



RAPAT KOORDINASI

**PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI**

Senin, 6 Oktober 2025

**TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025**

UNDANGAN RADIOGRAM

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA						
FORMULIR BERITA						
Register No :						
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT			
DARI : MENTERI DALAM NEGERI						
UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA						
TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI						
KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA						
Nomor : 500.2.3/6991/SJ						
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN ARAHAN MENTERI KEUANGAN TERKAIT PERCEPATAN REALISASI BELANJA UTK MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE PD HARI SENIN TGL 6 OKTOBER 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING DGN MEETING ID 677 057 3756 PASSWORD INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI JABATAN NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL YOUTUBE KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 KMA PERCEPATAN REALISASI BELANJA UTK MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK KMA CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE DAN TIDAK DIWAKILKAN BERSAMA FORKOPIMDA PROV KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN KEUANGAN DAERAH KMA PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE DAN TIDAK DIWAKILKAN BERSAMA FORKOPIMDA KAB GARING KOTA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN KEUANGAN DAERAH KMA PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI DRESS CODE PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA EEE TTK DUM TTK HBS						
TANGGAL PEMBUATAN 3 Oktober 2025						
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL		No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal <u>Tomsy Tohir</u>			Terima	Kirim		
Tanda Tangan						

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Pakor Inflasi via zoom

Hari/Tanggal : Senin / 6 OKT 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	Hj. ERNA LISA HARAHY	WALIKOTA		1
2	WANTONO, SE	Wakil Walikota		2
3	Kanang	Ku Bag perind		3
4	Asep S	Asisten f.		4
5	Fikri Nazwan S.	INSPEKTORAT	L	5
6	Abdussamad	Dikoren	L	6
7	Appiansa	BPPD	L	7
8	Agus Muslim	Bps Kota BD	L	8
9	Rahmatullah	BP KAP	L	9
10	H. M. Maulan	PUPA		10
11	Rahmat Taqib	Inspektur	L	11
12	Dati Hartati	Disasaparin	P	12
13	Wiwien R	DKP3	P	13
14	HERMAN PRAYOGA	ADC		14
15	Fax	bag E ko & B	L	15
16	Mulyani	Inspektur	L	16
17	Indra	Bag Perekonomian		17
18	DIAN YUDHA ASUTI	BAG. Ekonomi		18
19				19

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/6991/SJ Tanggal 3 Oktober 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
 1. Menteri Dalam Negeri
 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat :

Senin, 6 Oktober 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
 1. **BADAN PANGAN NASIONAL**
 - a) Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis. Beberapa komoditas seperti ayam ras, bawang merah, dan kedelai berada di bawah HAP/HPP, sedangkan beras, minyakita, dan jagung masih di atas HET. Stok beras nasional di gudang BULOG mencapai 3,84 juta ton, dengan sebagian dilakukan reprocessing untuk menjaga kualitas.
 - b) Untuk menjaga daya beli masyarakat, Bapanas menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta KPM beserta tambahan minyakita, serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 9.582 kali di seluruh Indonesia. Program SPHP Jagung juga dijalankan dengan alokasi 52.400 ton bagi peternak layer mandiri guna menekan harga jagung dan menjaga stabilitas harga telur serta ayam ras.
 - c) Selain itu, Bapanas melakukan koordinasi pengendalian harga cabai merah keriting yang mengalami kenaikan, serta memastikan distribusi pangan nasional tetap aman. Secara umum, ketersediaan pangan nasional 2025 berada pada kondisi aman, meskipun beberapa komoditas seperti kedelai dan bawang putih masih memerlukan impor.
 2. **BADAN PUSAT STATISTIK**
 - a) Pada bulan September 2025, Indonesia mencatat inflasi sebesar 0,21 persen (month-to-month) setelah sebelumnya mengalami deflasi pada Agustus. Secara tahunan (year-on-year), tingkat inflasi mencapai 2,65 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,84 persen. Kenaikan harga terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,38 persen serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,24 persen. Beberapa komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi antara lain cabai merah, daging ayam ras, cabai hijau, dan emas perhiasan.
 - b) Memasuki Minggu I Oktober 2025, berdasarkan data SP2KP Kemendag, tercatat 18 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan 20 provinsi mengalami penurunan. Komoditas yang paling banyak memberikan andil terhadap kenaikan IPH adalah cabai merah dan daging ayam ras. Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan (5,65 persen) di Pulau Sumatera, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (2,71 persen) di Pulau Jawa, dan Kabupaten Buton Utara (2,83 persen) di wilayah luar Jawa dan Sumatera.
 - c) Dari sisi harga komoditas utama, cabai merah mengalami kenaikan harga sebesar

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

6,95 persen, daging ayam ras naik 1,74 persen, dan telur ayam ras naik 1,19 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Harga cabai merah dan telur ayam ras tercatat berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), sedangkan daging ayam ras masih berada di bawah HAP.

- d) Secara keseluruhan, perkembangan harga pada September hingga awal Oktober 2025 menunjukkan tekanan inflasi yang masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan bergejolak. Oleh karena itu, penguatan koordinasi pengendalian pasokan dan distribusi pangan perlu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun.
- e) Pada minggu ke-1 Oktober 2025, **Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Banjarbaru** mencatat deflasi sebesar -0,21. Penurunan harga tersebut dipengaruhi terutama oleh komoditas:
 - Bawang Merah (-0,0916)
 - Beras (-0,7813)
 - Cabai Merah (-0,0693)

Deflasi yang terjadi pada minggu pertama Oktober 2025 menunjukkan adanya penurunan permintaan dan melimpahnya pasokan komoditas pangan utama, seperti beras, bawang merah, dan cabai merah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh meningkatnya pasokan pascapanen di beberapa daerah penghasil serta melandainya permintaan masyarakat setelah periode konsumsi tinggi di bulan sebelumnya. Meskipun secara jangka pendek menekan tekanan inflasi, namun fenomena ini perlu diwaspadai karena berpotensi menurunkan pendapatan petani dan pelaku usaha pangan, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal.

3. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a) Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah dengan fokus pada pendampingan hukum di sektor pangan dan percepatan realisasi belanja pemerintah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah importasi bawang putih, di mana ketergantungan tinggi pada impor, keterlambatan izin, serta potensi praktik kartel dan spekulasi menyebabkan lonjakan harga dan menekan daya beli masyarakat. Untuk itu, Kejaksaan mendorong percepatan dan transparansi proses perizinan impor serta pengawasan distribusi melalui langkah preventif dan represif guna mencegah penyimpangan dan monopoli pasar.
- b) Selain itu, Kejaksaan memberikan pendampingan hukum (legal assistance) bagi kementerian dan pemerintah daerah agar proses belanja publik dapat berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum. Dukungan ini juga diwujudkan melalui kegiatan nyata seperti Gerakan Pangan Murah serta program penanaman dan panen komoditas strategis di berbagai daerah. Upaya tersebut mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

4. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- a) Kementerian Perdagangan berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya minyak goreng sebagai salah satu komoditas strategis yang memengaruhi inflasi. Berdasarkan data per awal Oktober 2025, harga Minyakita tercatat rata-rata Rp16.658/liter, stabil dan hanya turun tipis dibanding bulan sebelumnya, sementara minyak goreng kemasan premium berada pada Rp22.349/liter. Melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), pemerintah memastikan produsen minyak sawit menyalurkan sebagian produksinya untuk pasar dalam negeri. Realisasi DMO pada Agustus

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

mencapai 194.060 ton dan September 164.660 ton, seluruhnya dalam bentuk Minyakita.

- b) Untuk memperkuat distribusi, Kemendag mendorong peran BUMN pangan seperti BULOG dan ID Food, namun realisasi penerimaan Minyakita oleh BUMN masih rendah, hanya sekitar 7,9 persen dari total distribusi. Oleh karena itu, Kemendag menekankan perlunya peningkatan kerja sama antara produsen dan BUMN, terutama dalam penyaluran ke wilayah timur seperti NTT dan Papua, yang masih mencatat harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
- c) Sebagai langkah optimalisasi, Kemendag meminta seluruh dinas perdagangan daerah memperbarui data kebutuhan konsumsi minyak goreng, yang hingga akhir September baru disampaikan oleh 174 kabupaten/kota atau 33,85 persen dari total wilayah. Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi, memastikan pasokan merata di seluruh daerah, dan menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat agar tetap terjangkau di pasar.

5. KEMENTERIAN PERTANIAN

- a) Kementerian Pertanian berfokus menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan strategis melalui pengamanan produksi, distribusi, serta pengendalian harga komoditas utama seperti padi, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur, gula, dan minyak goreng. Berdasarkan data KSA BPS Agustus 2025, produksi padi hingga November diproyeksikan mencapai 33,18 juta ton beras, sementara produksi jagung sebesar 15,25 juta ton, naik 8,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui pendampingan pertanaman, optimalisasi pompanisasi dan irigasi, percepatan tanam, mekanisasi panen, serta penguatan penyerapan gabah untuk menjaga harga di tingkat petani.
- b) Untuk menjaga stabilitas pasokan hortikultura, Kementan memperkuat Early Warning System (EWS) dan memperluas sentra baru bawang merah dan cabai, terutama di wilayah defisit dan rawan inflasi. Produksi bawang merah pada Oktober 2025 diperkirakan 93.000 ton, sedangkan cabai besar dan cabai rawit masih dalam kondisi pasokan aman meski dipengaruhi anomali cuaca. Pemerintah juga mendorong penambahan luas tanam, pembangunan gudang penyimpanan dingin (cold storage), serta hilirisasi produk hortikultura agar pasokan lebih stabil dan tidak bergantung pada musim panen.
- c) Selain tanaman pangan dan hortikultura, Kementan mengupayakan stabilisasi harga pada komoditas peternakan dan perkebunan. Harga ayam ras dan telur ayam saat ini relatif stabil, meski masih berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen. Kementan juga mendorong kemitraan antara petani jagung dan peternak ayam, membangun pabrik pakan mini, serta mengembangkan kawasan peternakan di luar Jawa. Untuk komoditas tebu dan sawit, langkah yang diambil meliputi perluasan areal tanam rakyat, penyediaan benih unggul, serta transparansi harga dan rendemen guna memastikan keseimbangan antara petani dan industri.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

6. KANTOR STAF PRESIDEN

- a) Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 3 Oktober 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman	-	Daging Sapi, Kedelai	Cabai Rawit Merah
	Waspada	-	Gula Pasir Curah	Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting
	Tidak Aman	-	Minyakita	Beras Medium (Zona 3), Bawang Putih, Jagung Tk Peternak, Telur Ayam Ras

- b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 3 Oktober 2025)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Puncak Jaya	9	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Yahukimo	8	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Intan Jaya	7	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras
Kab. Puncak	6	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Nduga	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Pegunungan Bintang	5	Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Tolikara	5	Bawang Putih, Beras Medium, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Mappi	5	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Lanny Jaya	4	Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita
Kab. Mamberamo Raya	3	Bawang Merah, Bawang Putih, Daging Ayam Ras
Kab. Asmat	3	Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah
Kab. Jayawijaya	3	Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Merauke	3	Telur Ayam Ras, Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Dogiyai	2	Bawang Merah, Bawang Putih
Kab. Paniai	2	Bawang Merah, Daging Ayam Ras
Kab. Maybrat	2	Bawang Putih, Minyakita
Kab. Yalimo	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Kaimana	2	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah
Kab. Kepulauan Tanimbar	2	Cabai Rawit Merah, Jagung Tk Peternak
Kab. Pegunungan Arfak	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Mamberamo Tengah	2	Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Waropen	2	Minyakita, Kedelai
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Bulungan	2	Kedelai, Daging Sapi
Kab. Karimun	2	Jagung Tk Peternak, Daging Sapi

7. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan Program Strategis Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029 untuk menekan backlog kepemilikan dan kelayakan rumah. Program ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penggerak lebih dari 185 subsektor industri perumahan. Hingga awal Oktober 2025, sebanyak 514 kabupaten/kota telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan total 49.635 unit hunian MBR yang telah memiliki PBG. Program ini juga memperkuat pemerataan pembangunan perdesaan, perkotaan, dan pesisir, sesuai mandat Asta Cita Presiden.
- b) Selain itu, dukungan pemerintah daerah terhadap program ini terus ditingkatkan melalui penganggaran bidang perumahan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni. Hingga 4 Oktober 2025, tercatat 31.391 unit di tingkat provinsi dan 88.515 unit di tingkat kabupaten/kota telah dianggarkan dalam APBD. Kementerian PKP juga mengawal validasi pendataan perumahan oleh pemda dan desa, di mana hingga saat ini baru 451.516 unit rumah atau 15,05 persen dari target 3 juta unit yang terdata. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

percepatan pendataan agar pelaksanaan program berjalan optimal dan tepat sasaran.

8. SATGAS PANGAN POLRI

- a) Satuan Tugas Pangan Polri berperan penting dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi melalui pengawasan distribusi dan stabilisasi harga pangan strategis. Satgas Pangan secara aktif melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan, spekulasi, serta distribusi ilegal bahan pokok yang dapat menyebabkan lonjakan harga di masyarakat. Kegiatan pengawasan dilakukan secara berjenjang dari pusat hingga daerah, berkoordinasi dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan kepatuhan terhadap ketentuan harga acuan pemerintah.
- b) Sepanjang 2025, Satgas Pangan Polri telah melakukan inspeksi dan operasi lapangan di berbagai wilayah untuk memantau pergerakan harga beras, gula, minyak goreng, dan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah. Polri juga menindak pelaku usaha yang terlibat dalam praktik curang seperti penyimpangan distribusi beras SPHP, manipulasi pasokan minyak goreng, serta penyelundupan hasil pertanian antarwilayah. Upaya ini dilakukan tidak hanya melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan persuasif dan preventif, dengan menggandeng pelaku usaha dan asosiasi perdagangan agar rantai pasok tetap sehat dan efisien.
- c) Melalui peran Satgas Pangan, Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pangan dan melindungi konsumen dari praktik ekonomi yang merugikan. Ke depan, sinergi antara Satgas Pangan, pemerintah daerah, dan TPID akan terus diperkuat dalam upaya mempercepat distribusi, mencegah spekulasi harga, serta memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun 2025 tetap aman dan terkendali.

9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a) Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional bulan September 2025 tercatat sebesar 0,21 persen (mtm) atau 2,65 persen (yoy), menunjukkan kondisi yang terkendali namun tetap perlu diwaspadai karena tekanan harga pangan bergejolak. Komoditas seperti cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau menjadi penyumbang utama inflasi, sementara bawang merah, tomat, dan beras berkontribusi pada deflasi. Dalam hal ini, TPID diinstruksikan untuk terus memperkuat koordinasi antarinstansi guna menjaga pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
- b) Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM), mempercepat realisasi belanja daerah, serta memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD) dalam penyediaan dan distribusi komoditas strategis. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga awal Oktober 2025, sebanyak 358 kabupaten/kota di 37 provinsi telah melaksanakan kegiatan GPM sebagai bentuk konkret intervensi harga. Selain itu, Kemendagri menyoroti pentingnya pendataan dan pemantauan harga secara digital melalui Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan (SP2KP) untuk meningkatkan akurasi kebijakan pengendalian inflasi.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- c) Dalam arahnya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun. Pemerintah daerah diminta menjaga ketersediaan pangan strategis, memperkuat cadangan pangan, dan memastikan program bantuan sosial tersalurkan tepat waktu. Dengan sinergi dan langkah konkret seluruh pihak, pengendalian inflasi diharapkan tetap terjaga di bawah 3 persen hingga akhir tahun 2025.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) **Perkuat koordinasi lintas sektor** antara pemerintah daerah, BUMN pangan, Satgas Pangan, dan pelaku usaha dalam menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi komoditas strategis, khususnya **beras, cabai, dan daging ayam ras**.
- 2) **Optimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)** secara rutin di berbagai kecamatan, terutama menjelang akhir tahun dan periode perayaan, untuk menekan harga pangan bergejolak dan menjaga daya beli masyarakat.
- 3) **Dorong percepatan realisasi belanja daerah**, khususnya belanja yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat (seperti subsidi transportasi pangan, operasi pasar, dan infrastruktur distribusi).
- 4) **Perkuat kerja sama antar-daerah (KAD)** dengan wilayah penghasil pangan di Kalimantan Selatan maupun provinsi sekitar untuk menjamin pasokan komoditas rawan inflasi seperti beras, cabai, dan bawang merah.
- 5) **Lakukan pemantauan harga dan stok secara intensif** melalui *SP2KP* dan sistem pemantauan harga lokal, serta pastikan pelaporan mingguan TPID akurat untuk mendukung keputusan cepat dalam rapat koordinasi.
- 6) **Dorong peran aktif Bulog dan ID Food** dalam penyaluran **beras SPHP dan Minyakita** di pasar tradisional agar disparitas harga antarwilayah dapat ditekan, terutama di wilayah pinggiran kota Banjarbaru.
- 7) **Kembangkan kegiatan produksi lokal dan urban farming** seperti penanaman cabai, bawang merah, dan sayuran cepat panen melalui kolaborasi dengan kelompok tani dan UMKM untuk memperkuat pasokan lokal.
- 8) **Tingkatkan langkah preventif pengawasan distribusi pangan** bekerja sama dengan **Satgas Pangan Polri** dan dinas terkait untuk mencegah penimbunan, spekulasi harga, serta penyimpangan distribusi di tingkat pedagang.

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh Wali Kota bersama TPID Kota Banjarbaru